



APSSAI Accounting Review (April 2023)

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Fattah, N.W., Damayanti, R.A., Idris, M.I.U. (2023). *APSSAI Accounting Review*, 3(1), 66-83. <https://doi.org/10.26418/apssai.v3i1.70>.

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nur Waina Fattah

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Ratna Ayu Damayanti

Universitas Hasanuddin, Indonesia

**Muhammad Istiyansyah Ulman
Idris**

Universitas Hasanuddin, Indonesia

Received: 7 April 2023

Revision: 17 April 2023

Accepted: 20 April 2023

JEL Classification: H83, M42
DOI: 10.26418/apssai.v3i1.70

ABSTRACT *The purpose of this research is to identify the relationship between the quality of local government financial reports and factors such as human resource competence, the use of accounting information systems, and internal control systems. In 2023, the Majene Regency's regional apparatus organization hosted this study. A total of 30 samples were used for this study's quantitative, causal approach. Each sample included two respondents. This study's questionnaire took the form of a declarative statement. In this study, multiple linear regression was employed to analyze the data. Analysis of the data demonstrates that the quality of local government financial reports is positively and significantly impacted by human resource competency, the implementation of accounting information technologies, and internal control systems.*

Keywords: *Human resources competence; Implementation of accounting information systems; Internal control systems; Quality of local government financial statements*

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan faktor-faktor seperti kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Penelitian ini dilakukan pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Majene. Sebanyak 30 sampel digunakan untuk penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal. Setiap sampel terdiri dari dua responden. Kuesioner penelitian ini berbentuk pernyataan deklaratif. Dalam penelitian ini, regresi linier berganda digunakan untuk menganalisis data. Analisis data menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal.

Kata kunci: Kompetensi sumber daya manusia; Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; Penerapan sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal

*Corresponding author, email: damayantiss@yahoo.com

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin
Jalan Perintis Kemerdekaan, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
90245*

Pendahuluan

Selama bertahun-tahun, belahan negara di dunia telah menetapkan standar pelaporan keuangan mereka masing-masing. Pada era globalisasi, perdagangan internasional dan perdagangan antar negara semakin meningkat yang membawa kolaborasi transaksi bisnis

Nur Waina Fattah, Ratna Ayu Damayanti, M. Istiayansyah, Ulman Idris

antar negara. Kondisi ini menuntut adanya keseragaman atas standar pelaporan keuangan agar laporan tersebut dapat dipahami dan memberikan informasi yang sama kepada pengguna di seluruh dunia. Opanyi (2016), karenanya, mengatakan bahwa peningkatan transaksi internasional antar negara membutuhkan transparansi, keseragaman, dan komparabilitas dalam standar pelaporan keuangan sektor publik.

International Public Sector Accounting Standard (IPSAS) sebagai suatu standar internasional menjadi pedoman yang mengatur persyaratan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait dengan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan pada organisasi publik. Pengembangan IPSAS berawal dari keinginan profesi akuntansi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dan lembaganya melalui peningkatan dan standarisasi pelaporan keuangan dunia (Delloitte, 2013). *International Public Sector Accounting Standard Board* (IPSASB) mengeluarkan IPSAS untuk mengatur pelaporan keuangan organisasi publik seluruh dunia agar seragam yaitu pelaporan yang berdasarkan basis akrual. Penggunaan basis akrual merupakan salah satu ciri dari praktik manajemen keuangan modern pada organisasi publik, bertujuan untuk memberikan informasi secara transparan atas transaksi dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Ardianto *et al.*, 2013; Hidayat *et al.*, 2022; Damayanti, 2013). Oleh karena itu, sangat ideal bagi organisasi publik melakukan perubahan dengan mengadopsi pelaporan keuangan berbasis akrual agar mengurangi terjadinya perilaku disfungsional (Syarifuddin, 2018).

Seperti halnya di Indonesia, pemerintah pusat dan pemerintah daerah didorong untuk melaksanakan akuntabilitas publik karena tuntutan masyarakat akan tata kelola pemerintahan yang efektif semakin meningkat (Asri & Damayanti, 2023). Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan (Sinosi & Syarifuddin, 2021). Komitmen ini dipenuhi melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur cara pertanggungjawaban pengelolaan pemerintahan, dimana keduanya menetapkan bahwa laporan keuangan merupakan format yang tepat. Laporan keuangan adalah alat untuk menunjukkan seberapa baik organisasi mengelola keuangan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Karenanya, kualitas pelaporan keuangan pemerintah, khususnya pemerintah pusat telah tumbuh secara eksponensial selama beberapa tahun terakhir (Tiurmaida *et al.*, 2021). Hal

Nur Waina Fattah, Ratna Ayu Damayanti, M. Istiarysyah Ulman Idris

ini dapat dilihat dengan meningkatnya jumlah kementerian dan lembaga yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2015. Opini ini menunjukkan bahwa kualitas pelaporan menjadi lebih baik, terutama pada tahun 2020, di mana hanya pemerintah pusat yang dinyatakan memenuhi syarat dalam pelaporan keuangannya. Namun, kondisi ini tidak disertai dengan pelayanan informasi kepada publik yang masih menghadapi berbagai masalah. Furqan *et al.* (2020) mengatakan bahwa meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah seharusnya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik. Namun nyatanya, masyarakat merasakan bahwa layanan publik masih berbelit-belit dan sulit dijangkau.

Karakteristik kualitatif yang menunjukkan kualitas laporan keuangan pemerintah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, merupakan standar normatif yaitu "dapat dipahami", "relevan", "andal", dan "dapat dibandingkan". Jika informasi dalam laporan keuangan telah sesuai dengan norma-norma karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas.

Menurut tim GTZ-USAID/CLEAN Urban (2001) dalam Dewi (2020), agar suatu instansi dapat menjalankan fungsi akuntansi yang berada di bawah kendalinya secara efektif dan efisien, instansi tersebut harus memiliki tingkat kompetensi dan kredensial yang sesuai. Dalam kerangka kerja Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berfungsi sebagai badan akuntansi yang bertanggung jawab untuk mencatat semua transaksi keuangan tunai, non-tunai, dan transaksi keuangan lainnya di dalam OPD. Pekerjaan-pekerjaan di pemerintahan, terutama yang memiliki tanggung jawab yang jelas, seharusnya hanya diisi oleh kandidat yang berkualitas. Dengan cara yang sama, divisi keuangan perlu memiliki staf yang berpengalaman dalam bidang akuntansi dan disiplin ilmu yang serupa. Temuan Adhitama (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh besar terhadap kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, ketepatan waktu pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo dipengaruhi oleh sumber daya manusia, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Apriansyah *et al.* (2020). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Karmila *et al.* (2014) mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tidak dipengaruhi oleh sumber daya manusia.

Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah selain kompetensi SDM. Pemanfaatan teknologi informasi untuk

mengelola data secara lebih cepat, efektif, dan efisien sangat diperlukan jika pengelolaan keuangan daerah ingin mencapai akuntabilitas dan transparansi. Diani (2014) berpendapat bahwa untuk melaksanakan prosedur penyampaian informasi yang tepat waktu dan benar serta penyediaan laporan keuangan yang berkualitas, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengembangkan dan mengimplementasikan peningkatan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan sistem informasi keuangan yang terkoordinasi secara nasional diwajibkan untuk membantu pengelolaan keuangan pemerintah daerah oleh UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kualitas pelaporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh sistem informasi akuntansi, menurut penelitian Lestari & Dewi (2020). Sementara, penelitian Sari *et al.* (2014) menunjukkan bagaimana laporan keuangan pemerintah kabupaten Jembrana dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi akuntansi. Menurut penelitian Diani (2014) menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh yang cukup berarti terhadap pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Paraman.

Selain itu, ketersediaan sistem pengendalian internal yang efisien mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketidaktepatan waktu, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan, serta kesalahan administratif dan kelemahan dalam sistem pengendalian internal, merupakan tanda-tanda bahwa laporan keuangan pemerintah daerah tidak memenuhi kriteria kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal sangat penting karena kesalahan dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam sistem akuntansi karena sistem akuntansi merupakan sistem informasi. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal yang ideal diperlukan untuk meyakinkan para pemangku kepentingan dan masyarakat umum atas kualitas laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pengendalian internal membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, keakuratan laporan keuangan, dan ketaatan terhadap semua aturan dan peraturan yang relevan (Anuruddha & Mahanamahewa, 2021). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, dan Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka mencapai efisiensi, efektivitas, dan pencegahan kerugian keuangan negara, maka sangat penting untuk memperhatikan sistem pengendalian intern dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Anuruddha & Mahanamahewa (2021) yang menunjukkan

bagaimana sistem pengendalian internal mempengaruhi keandalan laporan keuangan pemerintah Sri Lanka. Sistem pengendalian internal pemerintah berdampak pada laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan penelitian Lisda *et al.* (2018). Sistem pengendalian internal memiliki dampak yang cukup besar terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah lima puluh kota, menurut penelitian Riandani (2017). Sistem pengendalian internal tidak memiliki dampak yang terlihat pada keakuratan laporan keuangan, berbeda dengan penelitian Karmila *et al.* (2014).

Kajian ini meneliti kembali standar pelaporan keuangan pada organisasi pemerintah daerah sebagai akibat dari hasil penelitian sebelumnya yang saling bertentangan. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa baik pemerintah daerah Kabupaten Majene dalam menyusun laporan keuangan, sehingga peneliti melakukan penelitian ini untuk mengetahuinya. Laporan keuangan pemerintah daerah Majene telah diperiksa oleh BPK, dan hasilnya dalam beberapa tahun terakhir menghasilkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki oleh Pemda Majene, terutama yang berkaitan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Majene Tahun 2018 sampai 2020 disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan

Tahun	Permasalahan
2018	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan kas di bendahara pengeluaran yang belum memadai2. Pengelolaan dana kapitasi JKN di 11 puskesmas belum memadai3. Realisasi belanja jasa senilai Rp. 569.000.000 tidak didukung bukti yang memadai4. Kelebihan pembayaran biaya modal senilai Rp. 269.030.000
2019	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesalahan formulasi pada SIMDA BMD2. Pengelolaan BMD yang belum tertib3. Tidak optimalnya Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dan RSUD dalam melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pengadaan barang
2020	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelolaan penerimaan klaim dana BPJS kesehatan belum memadai2. Pengelolaan piutang PPB-P2 belum memadai3. Pengelolaan aset tetap belum tertib

Sumber: LHPK Pemda Kabupaten Majene 2018-2020

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat beberapa permasalahan seperti pengelolaan kas di bendahara pengeluaran belum memadai, pengelolaan dana

kapitasi JKN di 11 puskesmas belum memadai, dan adanya realisasi belanja jasa senilai Rp. 569.000.000 tidak didukung bukti yang memadai. Pada tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian penting oleh pemerintah Kabupaten Majene seperti masih adanya kesalahan formulasi pada SIMDA BMD, pengelolaan BMD yang belum tertib dan kurang optimalnya pengendalian dan pengawasan atas pengadaan barang di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga dan RSUD. Sedangkan di tahun 2020 terdapat beberapa permasalahan seperti Pengelolaan penerimaan klaim dana BPJS Kesehatan belum memadai, pengelolaan piutang PPB-P2 belum memadai, dan pengelolaan aset tetap belum tertib. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti mengambil judul Pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Majene).

Kajian Literatur dan Pengembangan Hipotesis

Teori Keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal, dimana agen bertindak sebagai pihak pengelola perusahaan sedangkan prinsipal merupakan pihak pemilik serta keduanya terikat dalam sebuah kontrak (Ternalemta *et al.*, 2021). Teori keagenan atau agensi berasal dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama dalam teori ini adalah terdapat hubungan kerja antara pihak yang memberikan hak (prinsipal) yaitu investor perusahaan dan pihak yang berwenang (agen) dalam hal ini manajer perusahaan, dalam bentuk kontrak kerja yang sama disebut *nexus of contract*. Implikasi dari penerapan teori ini dapat mengarah pada perilaku yang efektif atau perilaku yang oportunistik terhadap agen. Dalam hal pelaporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai agen dan berkewajiban memberikan informasi yang berguna kepada pengguna informasi dalam hal ini adalah publik.

Hubungan antara teori keagenan dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene berperan sebagai agen yang diwajibkan untuk memberikan laporan kepada prinsipal atau masyarakat dalam bentuk pelaporan keuangan yang berkualitas. Masalah keagenan sering muncul ketika pelaksana (agen) cenderung memaksimalkan kepentingan satu sama lain yang timbul dari proses penganggaran, pengambilan keputusan, sampai penyajian laporan keuangan yang wajar untuk menunjukkan kepada pihak legislatif dan rakyat bahwa kinerja mereka berjalan dengan baik (Riandani, 2017).

Oleh karena itu hadirlah penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dapat menjadi landasan agen dalam hal ini OPD Majene dalam melihat kualitas laporan keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Sari *et al.* (2014) menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pemahaman standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jembrana. Sementara itu, Diani (2014) mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah, dan peran audit internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Lebih lanjut, kompetensi sumber daya manusia yang baik akan memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhitama (2017) yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah *et al.* (2020) menunjukkan bahwa sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi baik maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan penelitian terdahulu maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H₁: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Apriansyah *et al.* (2020) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang diterima oleh BPKAD Kabupaten Badung.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisda *et al.* (2018) menunjukkan adanya peningkatan terhadap kualitas laporan keuangan di desa-desa di Kabupaten Bandung Barat sebesar 79,3% setelah penerapan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) desa, sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), dan kompetensi sumber daya manusia (SDM). Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Adhitama pada tahun 2017 yang menunjukkan bahwa penerapan

standar akuntansi pemerintahan (SAP), sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD), dan kompetensi sumber daya manusia memberikan dampak yang baik terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mengamanatkan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional dalam menunjang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari *et al.* (2014) menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jembrana. Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H₂: Penerapan sistem informasi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Riandani (2017) mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota secara signifikan ditingkatkan oleh kompetensi SDM dan mekanisme pengendalian internal. Sama halnya dengan penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki dampak yang nyata terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Karmila *et al.* (2014) menunjukkan bahwa pengendalian intern, kapasitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah provinsi, dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anuruddha & Mahanamahewa (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal berperan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi, keandalan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga

dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anuruddha & Mahanamaheva (2021) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Sri Lanka. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisda *et al.* (2018), mereka menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Bandung Barat. Dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk meyakinkan *stakeholders* maupun publik tentang kualitas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah maka dibutuhkan sistem pengendalian internal yang optimal. Dengan demikian dapat diambil hipotesis sebagai berikut.

H₃: Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi pengaruh sistem pengendalian intern, penerapan sistem informasi keuangan, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan studi kasus pada organisasi perangkat daerah (OPD) pemerintah daerah Kabupaten Majene. Survei berbasis kuesioner adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jawaban atas kuesioner yang diberikan kepada partisipan.

Populasi merupakan seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Majene dimana jumlah populasi OPD adalah sebanyak 43 OPD. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili jumlah populasi. Teknik penentuan jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan rumus *slovin*. Dengan menggunakan rumus *slovin* akan memperkecil jumlah pengambilan sampel maka rumus *slovin* ini cocok digunakan untuk memperlancar dan mengefisienkan penelitian. Adapun cara menghitung sampel dengan menggunakan rumus *slovin* adalah sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{(1 + N) * e^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang

masih dapat ditolerir atau diinginkan sebesar 10% (0.1)

Berdasarkan pada rumus tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar:

$$n = \frac{43}{1+43(0.1)^2} = 30.069 \text{ (dibulatkan menjadi 30 sampel penelitian)}$$

Dari perhitungan menggunakan rumus *slovin* tersebut, maka sampel yang digunakan adalah sebanyak 30 sampel. Adapun skema pengisian kuesioner pada setiap OPD diwaliki oleh dua responden yang terdiri dari 1) kepala bagian keuangan/staf keuangan untuk lembar kuesioner variabel kompetensi sumber daya manusia (X_1), variabel sistem pengendalian internal (X_3), dan kualitas laporan keuangan (Y), dan 2) operator SIMDA untuk lembar kuesioner variabel sistem informasi akuntansi (X_2).

Analisis regresi berganda adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Efektivitas sistem pengendalian intern, penerapan sistem informasi akuntansi, dan kompetensi sumber daya manusia diuji dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Majene dengan menggunakan analisis regresi berganda. Peneliti memutuskan untuk menggunakan analisis regresi berganda untuk penelitian ini karena analisis regresi berganda dapat menarik kesimpulan yang jelas mengenai dampak dari setiap variabel independen yang digunakan terhadap variabel dependen. Aplikasi SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) digunakan untuk mengolah pendekatan analisis data regresi berganda.

Analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini diformulasikan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Dimana:

- Y = kualitas laporan keuangan
 X_1 = kompetensi sumber daya manusia
 X_2 = penerapan sistem informasi akuntansi
 X_3 = sistem informasi akuntansi
 a = konstanta
 b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi
 e = *error*

Hasil dan Pembahasan

Sebelum dilakukan uji hipotesis, sejumlah uji terkait data penelitian seperti validitas, reliabilitas data serta asumsi klasik telah dilakukan. Uji validitas adalah prosedur yang

Nur Waina Fattah, Ratna Ayu Damayanti, M. Istiarysyah Ulman Idris

digunakan untuk mengevaluasi isi instrumen dengan tujuan untuk menentukan seberapa akurat instrumen tersebut ketika digunakan dalam sebuah penelitian. Dengan menghitung korelasi antara nilai-nilai yang disimpulkan dari pernyataan, korelasi Pearson digunakan dalam uji validitas ini. Jika tingkat signifikan suatu pernyataan adalah 0.05 atau lebih rendah, maka pernyataan tersebut dianggap valid. Hasil dari uji validitas data tercantum disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Sig (2-Tailed)	sig	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya	X1.1	0.000	0.050	Valid
Manusia	X1.2	0.000		Valid
	X1.3	0.000		Valid
	X1.4	0.000		Valid
	X1.5	0.000		Valid
	X1.6	0.000		Valid
Penerapan Sistem	X2.1	0.000	0.050	Valid
Informasi Akuntansi	X2.2	0.000		Valid
	X2.3	0.000		Valid
	X2.4	0.000		Valid
	X2.5	0.000		Valid
Sistem Pengendalian	X3.1	0.000	0.050	Valid
Internal	X3.2	0.000		Valid
	X3.3	0.000		Valid
	X3.4	0.000		Valid
	X3.5	0.000		Valid
	X3.6	0.000		Valid
Kualitas Laporan	Y.1	0.000	0.050	Valid
Keuangan	Y.2	0.000		Valid
	Y.3	0.000		Valid
	Y.4	0.000		Valid
	Y.5	0.000		Valid
	Y.6	0.000		Valid
	Y.7	0.000		Valid

Sumber: Data Diolah (2022)

Dapat dilihat bahwa semua item pernyataan yang dievaluasi terbukti sah berdasarkan temuan uji validitas. Hal ini dikarenakan setiap item pernyataan memiliki nilai signifikan $0.000 < 0.05$, sehingga semua pernyataan dianggap benar.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang dapat dipercaya, uji reliabilitas adalah suatu keharusan. *Cronbach's Alpha* digunakan dalam uji reliabilitas untuk melihat seberapa baik item-item kuesioner berhubungan satu sama lain. Jika $Cronbach's Alpha > 0.60$ maka kuesioner dianggap reliabel dan jika $Cronbach's Alpha < 0.60$ maka kuesioner dianggap tidak reliabel. Tabel 3 menyajikan temuan uji reliabilitas. Berdasarkan hasil uji reliabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel dalam penelitian karena nilai *Cronbach's Alpha* semua variabel yang telah diteliti lebih dari 0.60.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

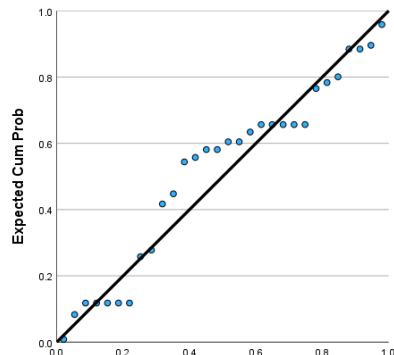
No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1.	Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.760	Reliabel
2.	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	0.927	Reliabel
3.	Sistem Pengendalian Internal	0.754	Reliabel
4.	Kualitas Laporan Keuangan	0.969	Reliabel

Sumber: Data Diolah (2022)

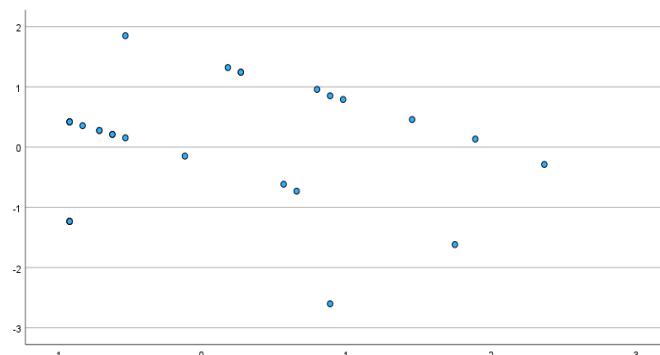
Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas data, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam model regresi, nilai residual terstandarisasi terdistribusi secara teratur atau tidak. Untuk mencegah terjadinya bias dalam analisis data, diperlukan data yang terdistribusi secara teratur. Uji *standardized residual* PP plot digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan uji normalitas. Jika residual terstandarisasi dari plot PP mendekati garis diagonal, data dikatakan terdistribusi secara normal. Dapat dilihat pada Gambar 1, penyebaran titik-titik di sekitar garis diagonal, seperti yang ditentukan oleh hasil uji normalitas, mengikuti arah garis diagonal. Hal ini mengindikasikan bahwa data penelitian terdistribusi secara teratur.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat varian variabel yang tidak sama. Salah satu cara untuk mendeteksi adanya masalah heteroskedastisitas yaitu uji heteroskedastisitas dengan metode analisis grafik. Metode analisis grafik dilakukan dengan mengamati *scatterplot* (Lihat Gambar 2). Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas, titik-titik terdistribusi secara acak pada sumbu Y, baik di atas

maupun di bawah angka nol. Dapat dikatakan bahwa model regresi yang digunakan tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.



Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Selanjutnya, uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan atau keterkaitan antar variabel independen dalam model regresi. Meneliti nilai TOL (*tolerance*) dan VIF (*Variance Inflation Factor*) merupakan salah satu teknik untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi. Jika nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka regresi dinilai bebas dari multikolinearitas. Table 4 menampilkan hasil uji multikolineartitas. Dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel independen berada di atas 0.10 dan nilai VIF di bawah 10, sesuai dengan hasil uji multikolinearitas. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada multikolinearitas atau korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga layak untuk digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	Variance Inflation Factor
T_X1	0.877	1.141
T_X2	0.897	1.115
T_X3	0.913	1.096

Sumber: Data Diolah (2022)

Tahap selanjutnya dalam analisis data adalah menguji hipotesis dengan regresi linear berganda. Berdasarkan pada hasil regresi linier berganda yang disajikan dalam Tabel 5, terbentuk persamaan dasar sebagai berikut:

$$Y = 0.508 + 1.851 + 3.503 + 0.171 + e$$

Ketika variabel independen (kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal) konstan, maka kualitas laporan keuangan sebesar 0.508. Selanjutnya, jika variabel lain konstan, peningkatan sebesar 1%

akan menyebabkan nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia sebesar 1.851, penerapan sistem informasi akuntansi sebesar 3.503 dan sistem pengendalian internal sebesar 0.171.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	Standar Error	Beta	t	Signifikansi
Konstanta	0.508	0.334		1.522	0.040
X1_Total	1.851	0.209	1.122	8.840	0.001
X2_Total	3.503	0.173	1.939	2.247	0.001
X3_Total	0.171	0.137	0.104	1.251	0.020
R ²		0.983			
Adjusted R ²		0.981			
Uji F		498.813			

Sumber: Data Diolah (2022)

Lebih lanjut, Tabel 5 juga menampilkan nilai koefisien determinasi (R^2). Berdasarkan pada nilai *adjusted R²* yang sebesar 0.981, dapat dimaknai bahwa sebesar 98.1% perubahan kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal. Sementara itu, sisanya sebesar 1.9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Beralih ke hasil uji F atau uji simultan. Dapat dilihat bahwa hasil F_{hitung} adalah sebesar 498.813. Selanjutnya, peneliti membandingkan hasil tersebut dengan F_{tabel} pada taraf nilai signifikansi 0.05 dan $df = n-k$ yaitu $30-4 = 26$. Hasil F_{tabel} yang diperoleh adalah sebesar 2.975. Dengan demikian diketahui bahwa F_{hitung} (498.813) $>$ F_{tabel} (2.975). Artinya, ketiga variabel independent secara serentak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Hasil uji parsial (uji t) juga dapat dilihat pada Tabel 5. Berdasarkan hasil uji t maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel independen <0.05 . Untuk itu dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Nilai signifikan sebesar 0.001 pada tingkat kesalahan 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *p value* 0.001 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai koefisien regresi (β) sebesar 1.851. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa koefisien regresi positif

maka hipotesis diterima. Jadi, hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Temuan dari uji hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap keakuratan laporan keuangan. Sebagian besar dari mereka yang berpartisipasi dalam survei ini percaya bahwa memiliki personil yang berkualitas akan memastikan laporan keuangan yang akurat. Dibutuhkan tenaga kerja yang berpengalaman dalam akuntansi pemerintah, keuangan daerah, dan bahkan mungkin organisasi yang terkait dengan pemerintah untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas tinggi. Diharapkan bahwa masyarakat akan mendapatkan manfaat dari memiliki akses ke laporan ini dengan mempelajari lebih lanjut tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Temuan penelitian ini bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan mendukung penelitian Adhitama (2017), Apriansyah *et al.* (2020), dan Lisda *et al.* (2018). Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas tinggi dapat dihasilkan dengan adanya sumber daya manusia yang kompeten.

Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Nilai Signifikan sebesar 0.001 pada tingkat kesalahan 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *p value* 0.001 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0.05 ($0.000 < 0.05$) dan nilai koefisien regresi (β) sebesar 3.503. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa koefisien regresi positif maka hipotesis diterima. Jadi, hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penggunaan SIA memiliki dampak yang baik dan signifikan secara statistik terhadap kredibilitas laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan dengan bantuan perusahaan IT. Temuan penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Lestari & Dewi (2020), Sari *et al.* (2014), dan Adhitama (2017), yang semuanya menemukan bahwa sistem informasi akuntansi meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bagaimana kualitas laporan keuangan akan meningkat dengan bantuan sistem informasi keuangan daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Nilai Signifikan sebesar 0.020 pada tingkat kesalahan 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai *p value* 0.020 lebih kecil dari tingkat kesalahan 0.05 ($0.001 < 0.05$) dan nilai koefisien regresi (β)

sebesar 0.171. Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa koefisien regresi positif maka hipotesis diterima. Jadi, hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis pengaruh positif dan signifikan dari sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan didukung oleh bukti empiris. Hal ini berarti bahwa pengendalian internal berkontribusi pada peningkatan produktivitas, akurasi dalam pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Selain itu, sistem pengendalian internal pemerintah daerah dalam pelaporan keuangan harus dioptimalkan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian negara. Temuan penelitian ini mendukung temuan Anuruddha & Mahanamahewa (2021), Lisda *et al.* (2018), dan Riandani (2017), yang menemukan bahwa pengendalian internal yang kuat dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal dapat menginspirasi kepercayaan terhadap keandalan laporan keuangan di antara para pemangku kepentingan dan masyarakat umum.

Kesimpulan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Majene dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan adanya mekanisme pengendalian internal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan Kabupaten Majene akan meningkat berkat tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, dukungan sistem informasi akuntansi, dan adanya sistem pengendalian internal yang berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Dengan demikian, OPD Kabupaten Majene berperan sebagai agen yang diwajibkan untuk memberikan laporan kepada prinsipal atau masyarakat dalam bentuk pelaporan keuangan yang berkualitas untuk selanjutnya para pemakai laporan keuangan dalam hal ini pihak legislatif atau biasa disebut *principal* dalam teori keagenan, mampu memahami dan mampu menggunakan informasi serta menilai kinerja mereka dengan baik.

Penelitian ini dilakukan hanya pada satu Kabupaten di Sulawesi Barat, yaitu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Majene sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasi ke semua objek secara keseluruhan. Selain itu, adanya keterbatasan waktu dan biaya sehingga jumlah sampel yang diambil relatif kecil dan hanya memenuhi syarat minimum.

Daftar Pustaka

- Adhitama, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Anuruddha, M.S., & Mahanamahewa, P. (2021). Influence the Quality of Accounting Information Systems and the Effectiveness of Internal Control on Public Financial Reporting Quality; an Empirical Sturdy. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 4(2), 155-167.
- Asri, M.F., Damayanti, R.A., & Nirwana. (2023). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, VII(1), 1-24.
- Damayanti, R.A. (2013). Akuntansi Akrual dan Penerapannya di Sektor Publik: Sebuah Agenda Pembaharuan, dalam Ardianto, Irawan, A.S., Islahuddin, Ichsan, M., Mimba, N.P.S.H., & Damayanti, R.A. (2013). Modul Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Konsep, Pemikiran dan Implementasi di Indonesia. *Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Konsep, Pemikiran, Dan Implementasi Di Indonesia*, 122.
- Delloite. (2013). *International Public Sector Accounting Standards in your pocket, 2013 Edition*.
- Diani, D.I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Furqan, A.C., Wardhani, R., Martani, D., & Setyaningrum, D. (2020). The effect of audit findings and audit recommendation follow-up on the financial report and public service quality in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*, 33(5), 535-559.
- Hidayat, R., Damayanti, R.A., & Darmawati, D. (2022). Pengaruh Kapasitas Organisasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang Dimoderasi oleh Komitmen Organisasi. *Al-Buhuts*, 18(2), 365-379. <https://www.jurnal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/article/view/3048>
- Karmila, K., Tanjung, A.R., & Darlis, E. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). *Sorot*, 9(1), 25-42.
- Lestari, N.L.W.T., & Dewi, N.N.S.R.T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan

Nur Waina Fattah, Ratna Ayu Damayanti, M. Istiayansyah Ulman Idris

- sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170-178.
- Lisda, R., Nurwulan, L.L., & Septianisa, L. (2018). Pengaruh Implementasi SIMDA Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung Barat). *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI)*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Riandani, R. (2017). Pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Studi empiris pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 5(2).
- Sari, N.P.Y.M.M., Adiputra, I.M.P., & Sujana, E. (2014). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas-Dinas di Pemerintah Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Sinosi, S.M., Syarifuddin, & Kusumawati, A. (2021). the Effect of Transparency, Competency and Financial Accounting Systems on the Accountability of Regional Financial Management With the Implementation of the Government'S Internal Control System As a Moderation Variables. *Journal Of Economic, Business and Accounting*, 4(04), 419–433.
<https://doi.org/10.33826/ijmras/v06i04.11>
- Syarifuddin, S. (2018). Accrual Basis Landscape: The Absence of Political Will in Preventing Dysfunctional Behaviour in Indonesia. *GATR Accounting and Finance Review*, 3(3), 77–83. [https://doi.org/10.35609/afr.2018.3.3\(2\)](https://doi.org/10.35609/afr.2018.3.3(2))
- Tiurmaida, J., Murwaningsari, E., Simanjuntak, B., & Mayangsari, S. (2021). Determinant of Indonesia government financial reporting quality. *Journal of Business and Management Review*, 2(9), 595-604.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah